



Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Penertiban Parkir Liar di Kawasan Pasar Jambi

Ninda Devina Indriani^{1*}, Hapsa², Fajar Alan Syahrier³

¹⁻³ Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nindadevinaa@gmail.com¹

Abstract. *The issue of illegal parking in the Pasar Jambi area remains unresolved despite various enforcement efforts carried out by the Jambi City Transportation Agency. Non-compliant parking practices, such as the presence of unauthorized parking attendants, the imposition of fees beyond official rates, and the lack of use of official attributes, indicate a discrepancy between established standards and actual field conditions. This study aims to analyze the effectiveness of the Transportation Agency's supervision in controlling illegal parking in the Pasar Jambi area by applying George R. Terry's supervision theory indicators. The research employs a qualitative method with a case study approach, using data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The findings reveal that supervision has been implemented through stages of setting standards, measuring performance, comparing implementation with standards, and taking corrective actions. However, the effectiveness of supervision is still not optimal. This is reflected in the persistent gap between standards and practices in the field, the limited number of supervisory personnel, and corrective actions that have not been consistently effective in creating a deterrent effect. Although enforcement has been carried out progressively through warnings, guidance, and direct actions, violations continue to occur repeatedly. The implications of this study highlight the need to strengthen consistency in supervision, enforce stricter sanctions, and enhance resource capacity so that supervision is not merely administrative but can create sustainable parking order.*

Keywords: *Effectiveness of Supervision; Enforcement; Illegal Parking; Pasar Jambi; Transportation Agency.*

Abstrak. Permasalahan parkir liar di Kawasan Pasar Jambi masih menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penertiban oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi. Praktik parkir yang tidak sesuai aturan, seperti keberadaan juru parkir tanpa izin, penarikan tarif di luar ketentuan, serta tidak digunakannya atribut resmi, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan kondisi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar di Kawasan Pasar Jambi dengan menggunakan indikator teori pengawasan menurut George R. Terry. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui tahapan penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan dengan standar, dan tindakan korektif. Namun, efektivitas pengawasan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan antara standar dan praktik di lapangan, keterbatasan jumlah petugas pengawas, serta tindakan korektif yang belum konsisten dalam memberikan efek jera. Meskipun penertiban telah dilakukan secara bertahap melalui teguran, pembinaan, hingga penindakan langsung, pelanggaran masih sering terjadi secara berulang. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan pada aspek konsistensi pengawasan, ketegasan dalam penerapan sanksi, serta peningkatan kapasitas sumber daya agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menciptakan ketertiban parkir yang berkelanjutan.

Kata kunci: Dinas Perhubungan; Efektivitas Pengawasan; Parkir Liar; Pasar Jambi; Penertiban.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan wilayah perkotaan di Indonesia ditandai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Pertumbuhan jumlah penduduk yang disertai dengan intensitas interaksi masyarakat di ruang publik mendorong peningkatan pergerakan kendaraan bermotor sebagai sarana utama mobilitas perkotaan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2025

diperkirakan mencapai 284,4 juta jiwa, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kebutuhan mobilitas masyarakat (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2025). Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap sistem transportasi perkotaan serta menuntut keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menjaga keteraturan pemanfaatan ruang publik.

Instrumen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah fungsi pengawasan. Pengawasan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pemantauan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang sistematis melalui proses evaluasi serta penerapan tindakan korektif guna memastikan bahwa kebijakan publik dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sarinah, Said, & Rijah, 2025). Tanpa pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, peningkatan mobilitas masyarakat berpotensi memunculkan berbagai bentuk penyimpangan dalam pemanfaatan ruang publik yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat ketertiban dan kualitas pelayanan publik.

Salah satu sektor pelayanan publik yang sangat memerlukan pengawasan dalam pelaksanaannya adalah penyelenggaraan perparkiran. Parkir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi perkotaan karena berfungsi sebagai tempat berhenti sementara bagi kendaraan ketika penggunanya melakukan berbagai aktivitas ekonomi maupun sosial. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan parkir sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Keberadaan fasilitas parkir tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan kendaraan untuk berhenti, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kelancaran arus lalu lintas, keteraturan pemanfaatan ruang publik, serta tingkat kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Kota Jambi sebagai salah satu pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Jambi mengalami peningkatan pergerakan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan perkembangan wilayahnya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Jambi mengalami peningkatan dari 635,1 ribu jiwa pada tahun 2024 menjadi 642,3 ribu jiwa pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2025). Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut diikuti dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor sebagai sarana mobilitas masyarakat. Peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun tidak hanya mencerminkan tingginya intensitas pergerakan masyarakat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap kapasitas jaringan jalan serta ketersediaan fasilitas transportasi pendukung, khususnya ruang parkir di kawasan publik.

Permasalahan penyelenggaraan parkir seringkali muncul pada kawasan perdagangan dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi. Kawasan Pasar Jambi merupakan salah satu

pusat perdagangan utama di Kota Jambi yang setiap harinya menjadi tujuan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Tingginya mobilitas kendaraan di kawasan ini menyebabkan kebutuhan ruang parkir semakin meningkat. Namun demikian, keterbatasan ruang parkir serta pengelolaan yang belum optimal berpotensi memunculkan praktik parkir liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di Kawasan Pasar Jambi, khususnya pada ruas Jalan Sultan Thaha, praktik parkir liar masih ditemukan. Pengguna kendaraan seringkali dikenakan tarif parkir tanpa kejelasan besaran biaya dan tanpa disertai bukti pembayaran resmi. Selain itu, ditemukan pula tindakan pihak tidak berwenang yang memanfaatkan ruang publik sebagai lokasi parkir dengan melakukan pungutan kepada masyarakat. Praktik pungutan parkir tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pemanfaatan ruang publik (Setiono, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan parkir liar tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan ruang parkir, tetapi juga berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah.

Praktik parkir liar di kawasan perdagangan tidak hanya menimbulkan ketidakteraturan dalam pemanfaatan ruang publik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha di sekitarnya. Pengguna kendaraan menghadapi ketidakpastian layanan parkir serta potensi beban biaya tambahan yang tidak sesuai ketentuan. Sementara itu, pelaku usaha mengalami gangguan akses konsumen yang dapat memengaruhi aktivitas perdagangan (Nazwa et al., 2025). Selain itu, praktik parkir liar juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan publik, yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal (Putri & Arif, 2024).

Persoalan parkir liar tentunya juga mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, seperti Ketua DPRD Kota Jambi yang menilai bahwa praktik parkir liar berpotensi merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, DPRD mendorong Dinas Perhubungan untuk meningkatkan ketegasan dalam pengawasan dan penertiban parkir liar (IMCNews.id, 2025). Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi juga menerima laporan masyarakat terkait praktik parkir liar yang dinilai mengarah pada maladministrasi serta berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah (Detik.com, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan parkir liar tidak hanya menjadi masalah teknis transportasi, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewenangan pengawasan dan penertiban parkir di Kota Jambi berada di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pengawasan tersebut mencakup pengendalian terhadap petugas parkir di lapangan, ketertiban kendaraan yang diparkir, serta pengelolaan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui berbagai kegiatan operasional seperti patroli rutin, pemeriksaan atribut juru parkir, penggunaan karcis resmi, serta penertiban terhadap praktik parkir liar (Putri & Arif, 2024). Namun demikian, fakta masih berulangnya praktik parkir liar menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Selain itu, pelaksanaan pengawasan juga melibatkan koordinasi lintas instansi, seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian, dalam rangka memperkuat penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban lalu lintas di kawasan dengan tingkat mobilitas tinggi (Mulia, Saputra, Syamsir, & Embi, 2022). Koordinasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan melalui pembagian peran dan kewenangan antarinstansi. Namun dalam praktiknya, koordinasi tersebut belum sepenuhnya berjalan maksimal sehingga pelaksanaan pengawasan dan penertiban parkir masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan parkir liar di Kawasan Pasar Jambi, khususnya pada ruas Jalan Sultan Thaha, tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan dan keterbatasan ruang parkir, tetapi juga berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah. Praktik parkir liar yang terus berulang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menciptakan keteraturan parkir secara berkelanjutan. Meskipun penelitian mengenai pengawasan perparkiran telah dilakukan di berbagai daerah, kajian yang secara khusus menelaah tahapan pelaksanaan fungsi pengawasan parkir pada kawasan perdagangan dengan tingkat mobilitas tinggi di Kota Jambi masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menertibkan praktik parkir liar di kawasan pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam penertiban parkir liar di Kawasan Pasar Jambi.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengawasan merupakan fungsi penting dalam manajemen organisasi maupun penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan, pemerintah dapat mengidentifikasi penyimpangan serta melakukan perbaikan agar kebijakan berjalan sesuai tujuan. Dalam

penelitian ini, konsep pengawasan merujuk pada teori George R. Terry yang menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan, menilai hasilnya, dan melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Proses ini terdiri dari empat tahapan utama, yaitu menetapkan standar, mengukur pelaksanaan, membandingkan hasil dengan standar, serta melakukan tindakan korektif (Terry & Rue, 2020). Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan bukan sekadar aktivitas pemantauan, tetapi merupakan proses sistematis yang menentukan sejauh mana suatu kegiatan berjalan optimal.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pengawasan parkir liar di berbagai daerah. Penelitian Winangun menunjukkan bahwa pengawasan di Kota Denpasar dilakukan melalui patroli langsung dan laporan masyarakat berbasis teknologi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan serta dukungan regulasi yang memadai (Winangun, 2022). Temuan serupa juga dikemukakan oleh Riyanto, Setiawan, dan Darwanto yang menunjukkan bahwa penertiban parkir liar di Kota Cirebon telah dilakukan, tetapi masih terkendala oleh lemahnya sanksi, keterbatasan personel, serta rendahnya kepatuhan juru parkir (Riyanto, Setiawan, & Darwanto, 2024).

Permasalahan parkir liar juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Kainde, Nayoan, dan Waworundeng menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan di Kabupaten Mimika belum optimal akibat keterbatasan sarana prasarana, lemahnya manajemen pengawasan, serta kemampuan aparaturnya yang masih terbatas (Kainde, Nayoan, & Waworundeng, 2021). Sementara itu, penelitian Tabisi, Lengkong, dan Londa di Kota Manado menunjukkan bahwa pengawasan memiliki pengaruh positif terhadap kondisi sarana publik, meskipun kualitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan (Tabisi, Lengkong, & Londa, 2023).

Selain itu, penelitian lain juga menyoroti dampak parkir liar terhadap kondisi lalu lintas perkotaan. Penelitian yang dilakukan Iranda, Endrawati, dan Nurul menunjukkan bahwa aktivitas parkir di badan jalan serta parkir liar di Kota Malang berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat pelayanan jalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan serta pengawasan parkir merupakan faktor penting dalam menjaga kelancaran lalu lintas serta fungsi ruang publik di kawasan perkotaan (Iranda, Endrawati, & Nurul, 2025). Penelitian oleh Ananda dan rekan-rekan juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pelaporan berbasis aplikasi untuk mendukung pengawasan yang lebih partisipatif (Ananda et al., 2023).

Selanjutnya pada lingkup internasional, terdapat penelitian Nissan di Swedia yang menunjukkan bahwa penerapan tarif parkir dapat menurunkan permintaan parkir secara

signifikan, namun peningkatan besaran denda tidak selalu efektif apabila tidak disertai dengan pengawasan yang memadai (Nissan et al., 2020). Hal ini diperkuat oleh penelitian Gössling yang menjelaskan bahwa pelanggaran parkir sering dianggap sebagai pilihan rasional ketika risiko pengawasan rendah, sehingga efektivitas pengawasan menjadi faktor utama dalam mendorong kepatuhan (Gössling et al., 2022).

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada hasil penertiban parkir liar, sementara proses pengawasan sebagai suatu tahapan operasional belum banyak dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan pengawasan sebagai proses yang berlangsung secara bertahap, mulai dari penetapan standar hingga tindakan korektif. Dengan mengambil studi kasus di Kawasan Pasar Jambi yang memiliki mobilitas tinggi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam menertibkan praktik parkir liar di Kawasan Pasar Jambi, serta bagaimana proses pengawasan tersebut dilaksanakan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih detail terkait proses pengawasan di lapangan, termasuk pelaksana, mekanisme, serta kondisi yang dihadapi. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat memusatkan perhatian pada satu objek penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika pengawasan parkir.

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Pasar Jambi, Kota Jambi. Lokasi ini dipilih karena kawasan pasar merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan tingkat mobilitas kendaraan yang cukup tinggi. Kondisi tersebut sering menimbulkan permasalahan perparkiran, termasuk munculnya praktik parkir liar yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat sehingga menjadikan lokasi ini relevan untuk melihat bagaimana pengawasan dilakukan dalam situasi dengan intensitas aktivitas yang padat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan informan, yaitu aparatur Dinas Perhubungan Kota Jambi, juru parkir, serta masyarakat pengguna jasa parkir. Data primer digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan

dilakukan serta bagaimana kondisi praktik parkir liar yang terjadi di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti peraturan terkait perparkiran, laporan kegiatan pengawasan, arsip instansi, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian guna memperkuat analisis permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat langsung kondisi perparkiran dan aktivitas pengawasan. Wawancara dilakukan secara purposive kepada pihak yang memiliki keterlibatan dan pengetahuan terkait pengawasan parkir. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap berupa data tertulis yang mendukung temuan penelitian. Ketiga teknik ini digunakan secara bersamaan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pengawasan parkir di kawasan penelitian.

Terakhir, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian mengenai pengawasan parkir. Setelah itu, data disusun dan disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dengan menafsirkan data yang telah diperoleh selama penelitian. Melalui proses analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menertibkan praktik parkir liar di Kawasan Pasar Jambi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan parkir liar di Kawasan Pasar Jambi masih menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi dalam upaya mewujudkan pengelolaan ruang publik yang tertib. Aktivitas perdagangan yang padat setiap hari mendorong tingginya mobilitas kendaraan, sementara ketersediaan lahan parkir terbatas. Kondisi tersebut memicu munculnya praktik parkir yang tidak tertata, seperti keberadaan juru parkir tanpa izin, penarikan tarif yang tidak sesuai ketentuan, serta penggunaan badan jalan sebagai lokasi parkir. Situasi ini tidak hanya menimbulkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan daerah dari retribusi parkir.

Dinas Perhubungan Kota Jambi sebagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang transportasi memegang peran strategis dalam mengatur sekaligus mengawasi penyelenggaraan parkir, termasuk di Kawasan Pasar Jambi. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan tidak

hanya bertanggung jawab terhadap penetapan lokasi parkir dan penarikan retribusi, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan perparkiran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap legalitas juru parkir, kesesuaian tarif, serta penggunaan ruang jalan agar tidak mengganggu kepentingan umum. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas dibandingkan banyaknya titik parkir, munculnya kembali juru parkir liar setelah penertiban, serta tingkat kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung tertib parkir. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan masih menghadapi tantangan dalam mencapai hasil yang optimal.

Penelitian ini menggunakan teori pengawasan dari George R. Terry sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi. Menurut Terry, pengawasan terdiri dari empat tahapan, yaitu menetapkan standar, mengukur pelaksanaan, membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta melakukan tindakan korektif. Keempat tahapan tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana pengawasan terhadap praktik parkir liar telah dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian tidak hanya menggambarkan proses pengawasan, tetapi juga menilai tingkat efektivitasnya dalam menertibkan parkir liar di Kawasan Pasar Jambi.

Menetapkan Standar Pengawasan

Penetapan standar pengawasan menjadi tahap awal yang sangat penting dalam menilai efektivitas pengawasan parkir liar di Kawasan Pasar Jambi. Dalam perspektif George R. Terry, standar berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana atau mengalami penyimpangan. Keberadaan standar memungkinkan adanya perbandingan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi nyata di lapangan. Tanpa standar yang jelas, proses pengawasan akan sulit dilakukan secara konsisten dan berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian dalam pelaksanaannya, sehingga efektivitas sangat dipengaruhi oleh kejelasan standar yang ditetapkan sebelum kegiatan pengawasan dilakukan.

Pada pengelolaan parkir di Kota Jambi, standar pengawasan tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga mencakup pedoman operasional. Standar ini meliputi dasar hukum pengelolaan parkir, ketentuan tarif retribusi, legalitas juru parkir melalui Surat Perintah Tugas (SPT), penggunaan atribut resmi, serta prosedur penertiban pelanggaran. Kejelasan unsur-unsur tersebut menjadi dasar untuk membedakan praktik parkir resmi dengan parkir liar. Artinya, secara konsep, standar sudah dirancang untuk mendukung ketertiban dan akuntabilitas pengelolaan parkir. Terlihat dari sisi regulasi, standar pengawasan telah memiliki landasan

hukum yang jelas. Pengaturannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, serta Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 32 Tahun 2018 terkait tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi parkir. Keberadaan Surat Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 557 Tahun 2025 tentang Tim Pengawasan dan Penertiban Parkir Liar juga memperkuat pelaksanaan di lapangan. Rangkaian regulasi ini menunjukkan bahwa standar pengawasan telah tersusun secara sistematis dan memiliki legitimasi yang kuat.

Standar juga terlihat pada penetapan tarif retribusi parkir yang diatur melalui regulasi daerah dan diperkuat dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan retribusi. SOP tersebut mengatur alur penyetoran, verifikasi, hingga pencatatan administrasi. Temuan di lapangan menunjukkan masih adanya perbedaan antara tarif resmi dan tarif yang dipungut oleh sebagian juru parkir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun standar tarif telah jelas, penerapannya belum konsisten. Selanjutnya yang menjadi bagian dari standar adalah legalitas juru parkir. Legalitas ini dibuktikan melalui kepemilikan Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi. Selain itu, juru parkir diwajibkan menggunakan atribut seperti rompi, tanda pengenal, dan karcis parkir. Atribut tersebut memudahkan identifikasi antara juru parkir resmi dan tidak resmi. Namun di lapangan masih ditemukan juru parkir yang tidak memiliki SPT atau tidak menggunakan atribut lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dipatuhi, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan sejak tahap awal.

Standar pengawasan juga mencakup prosedur penertiban melalui mekanisme pencabutan SPT. Prosedur ini dilakukan secara bertahap, mulai dari identifikasi pelanggaran, hingga pemberian sanksi setelah melalui teguran dan pembinaan. Mekanisme ini sebenarnya telah memberikan arah yang jelas terkait tindakan korektif. Akan tetapi, pendekatan yang cenderung persuasif tanpa pengawasan lanjutan membuat pelanggaran berpotensi kembali terjadi dan hal ini menunjukkan bahwa standar penindakan belum sepenuhnya memberikan efek jera. Keberadaan standar yang cukup lengkap sebenarnya sudah menjadi modal awal yang kuat dalam pengawasan parkir. Namun, tidak konsistennya penerapan di lapangan memperlihatkan kalau standar belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pengendali. Situasi ini membuat tahap penetapan standar belum mampu mendorong efektivitas pengawasan secara optimal, karena keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Mengukur Pelaksanaan Pengawasan

Setelah standar ditetapkan, tahap berikutnya adalah mengukur pelaksanaan pengawasan untuk melihat sejauh mana aturan tersebut diterapkan di lapangan. Menurut George R. Terry, pengukuran berfungsi untuk mengetahui kesesuaian antara rencana dan praktik, sekaligus mendeteksi adanya penyimpangan. Melalui proses ini, pengawasan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Tanpa pengukuran yang jelas dan berkelanjutan, sulit untuk menilai apakah pengawasan benar-benar berjalan efektif atau hanya sebatas prosedur administratif.

Pengukuran pelaksanaan pengawasan parkir liar di Kawasan Pasar Jambi dilakukan melalui kegiatan operasional seperti patroli, pemantauan langsung, serta pemeriksaan terhadap juru parkir. Petugas Dinas Perhubungan Kota Jambi memeriksa penggunaan atribut resmi, kepemilikan Surat Perintah Tugas (SPT), serta kesesuaian tarif yang ditarik kepada masyarakat. Selain itu, pengukuran juga terlihat dari bagaimana tindak lanjut diberikan ketika ditemukan pelanggaran. Intensitas kehadiran petugas, pembagian wilayah kerja, dan cakupan pengawasan menjadi aspek penting, mengingat tingginya aktivitas di kawasan pasar dapat membuka peluang munculnya kembali parkir liar apabila pengawasan tidak dilakukan secara merata.

Pelaksanaan pengukuran ini tampak melalui kehadiran petugas di lapangan yang melakukan patroli secara langsung. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bergantung pada laporan, tetapi juga berdasarkan pengamatan nyata terhadap kondisi parkir. Petugas melakukan pengecekan terhadap legalitas juru parkir dan memastikan kesesuaian praktik dengan aturan yang berlaku. Namun, pelaksanaan patroli belum sepenuhnya konsisten dan terjadwal. Kehadiran petugas sering menyesuaikan kondisi tertentu, seperti adanya laporan masyarakat atau situasi yang dianggap mendesak. Pola ini membuat pengawasan cenderung belum merata, sehingga masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.

Pengukuran juga terlihat dari tingkat kepatuhan juru parkir terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan terhadap SPT, atribut, pemberian karcis, serta tarif parkir menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kepatuhan tersebut. Meskipun mekanisme ini telah berjalan, masih ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, terutama terkait tarif dan keberadaan juru parkir tanpa legalitas. Keterbatasan jumlah petugas serta luasnya titik parkir membuat pengawasan belum menjangkau seluruh area secara optimal. Selain itu, pola juru parkir liar yang cenderung menghindari petugas menyebabkan pengawasan lebih bersifat responsif dibandingkan pencegahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran pelaksanaan sudah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya mampu memastikan penerapan standar secara konsisten dan merata di lapangan.

Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar

Tahap membandingkan pelaksanaan dengan standar merupakan inti dalam proses pengawasan karena menjadi dasar untuk menilai sejauh mana kegiatan yang berlangsung telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Menurut George R. Terry, melalui perbandingan dapat diketahui apakah pelaksanaan telah berjalan sesuai rencana atau masih terdapat penyimpangan. Ketika ditemukan perbedaan antara standar dan praktik, maka hal tersebut menunjukkan adanya celah yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, perbandingan tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai efektivitas pengawasan secara nyata.

Perbandingan pada penelitian ini dilakukan terhadap beberapa aspek utama, yaitu regulasi parkir, tarif retribusi, legalitas dan atribut juru parkir, serta prosedur penertiban. Secara normatif, seluruh aspek tersebut telah memiliki aturan yang jelas dan terstruktur. Namun, ketika dikaitkan dengan kondisi di Kawasan Pasar Jambi, terlihat adanya perbedaan antara standar dan pelaksanaan. Pada aspek regulasi misalnya, meskipun dasar hukum telah lengkap, praktik parkir liar masih ditemukan di sejumlah titik. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku di lapangan, terutama pada kawasan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi.

Perbandingan pada aspek tarif dan legalitas juru parkir juga menunjukkan kondisi yang serupa. Standar telah menetapkan besaran tarif resmi serta kewajiban pemberian karcis sebagai bukti pembayaran, tetapi praktik di lapangan masih menunjukkan adanya penarikan tarif yang tidak sesuai ketentuan. Di sisi lain, ketentuan mengenai legalitas melalui kepemilikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan penggunaan atribut resmi belum sepenuhnya dipatuhi. Masih ditemukan juru parkir tanpa identitas yang jelas, yang menandakan bahwa standar belum diterapkan secara konsisten. Situasi ini tidak hanya berdampak pada ketertiban, tetapi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan parkir.

Perbedaan juga terlihat pada aspek prosedur penertiban, dimana mekanisme penindakan telah disusun melalui tahapan teguran, pembinaan, sampai pencabutan SPT. Akan tetapi pelanggaran masih terjadi berulang hingga menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum memberikan efek jera. Pendekatan yang cenderung persuasif tanpa diikuti pengawasan lanjutan membuat standar penertiban belum berjalan optimal. Dari perbandingan ini terlihat bahwa meskipun standar telah dirancang dengan cukup baik, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada konsistensi dan ketegasan. Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya mampu memastikan kesesuaian antara aturan dan praktik di seluruh titik parkir Kawasan Pasar Jambi.

Tindakan Korektif

Setelah Setelah perbandingan antara pelaksanaan dan standar dilakukan, pengawasan dilanjutkan dengan tindakan korektif sebagai upaya memperbaiki penyimpangan yang ditemukan. Menurut George R. Terry, tindakan korektif bertujuan mengembalikan pelaksanaan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini penting karena menunjukkan apakah pengawasan mampu menghasilkan perubahan nyata atau hanya berhenti pada identifikasi masalah. Ketepatan dan ketegasan tindakan yang diambil sangat menentukan efektivitas pengawasan.

Pada penertiban parkir liar di Kawasan Pasar Jambi, tindakan korektif dilakukan sebagai respons terhadap berbagai pelanggaran, seperti keberadaan juru parkir tanpa izin, ketidaksesuaian tarif, serta penggunaan atribut yang tidak sesuai ketentuan. Pendekatan yang digunakan cenderung bertahap, dimulai dari tindakan ringan hingga sanksi yang lebih tegas. Cara ini dipilih untuk memberi kesempatan kepada pelaku memperbaiki kesalahan sekaligus menjaga kondisi sosial di kawasan pasar yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tindakan korektif tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan.

Pelaksanaan tindakan korektif diawali melalui teguran dan pembinaan langsung kepada juru parkir yang melanggar. Teguran diberikan sebagai peringatan awal, sedangkan pembinaan bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap aturan, termasuk mendorong pengurusan legalitas melalui Surat Perintah Tugas (SPT). Upaya ini menunjukkan adanya proses perbaikan yang bersifat edukatif. Namun, pelanggaran yang masih berulang mengindikasikan bahwa pembinaan belum sepenuhnya mampu membentuk kepatuhan yang konsisten. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tindakan awal lebih banyak berdampak jangka pendek, sementara perubahan perilaku belum sepenuhnya terbentuk.

Ketika pelanggaran tetap terjadi, tindakan dilanjutkan melalui penertiban langsung dan sanksi administratif seperti pencabutan SPT. Penertiban dilakukan dengan menghentikan aktivitas parkir yang tidak sesuai aturan, sedangkan pencabutan SPT menjadi bentuk sanksi paling tegas bagi pelanggaran berulang. Meskipun mekanisme ini telah tersedia, penerapannya belum konsisten dan cenderung lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif. Akibatnya, pelanggaran masih sering muncul kembali karena pelaku tidak selalu merasakan konsekuensi yang kuat. Situasi ini menunjukkan bahwa tindakan korektif sudah berjalan, tetapi ketegasan dan keberlanjutannya masih perlu diperkuat agar mampu mendorong kepatuhan secara lebih stabil di seluruh kawasan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam penertiban parkir liar di Kawasan Pasar Jambi pada dasarnya telah berjalan melalui tahapan yang cukup sistematis, meliputi penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, pembandingan dengan standar, hingga tindakan korektif. Standar pengawasan telah memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme pengukuran dilakukan melalui patroli dan pemantauan langsung, serta prosedur penertiban telah tersedia. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengelola parkir secara terstruktur. Namun, pada tahap pelaksanaan masih ditemukan berbagai kendala, seperti ketidakkonsistenan penerapan standar, keterbatasan intensitas pengawasan, serta belum meratanya pengawasan di seluruh titik parkir. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengawasan telah terbentuk, pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh praktik parkir di lapangan secara optimal.

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara standar yang telah ditetapkan dengan kondisi nyata di lapangan, terutama pada aspek tarif, legalitas juru parkir, dan kepatuhan terhadap penggunaan atribut resmi. Tindakan korektif yang dilakukan juga masih didominasi oleh pendekatan persuasif, sehingga belum memberikan efek jera yang kuat terhadap pelanggaran yang terjadi secara berulang. Situasi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu memastikan kesesuaian antara aturan dan praktik secara konsisten. Dengan demikian, pengawasan Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam penertiban parkir liar di Kawasan Pasar Jambi dapat dikatakan telah berjalan, tetapi efektivitasnya masih belum optimal karena belum mampu mengendalikan pelanggaran secara berkelanjutan.

Saran

Dinas Perhubungan Kota Jambi perlu memperkuat pelaksanaan pengawasan parkir liar agar tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga memberikan dampak yang nyata di lapangan. Standar pengawasan yang sudah jelas perlu diikuti dengan penerapan yang lebih konsisten, terutama pada aspek tarif, legalitas juru parkir, dan penggunaan atribut resmi. Selain itu, pengawasan perlu dilakukan secara lebih terjadwal dan merata dengan mempertimbangkan tingginya aktivitas di Kawasan Pasar Jambi. Penambahan jumlah petugas atau penguatan pembagian wilayah kerja juga penting agar seluruh titik parkir dapat terpantau dengan baik. Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan sebagai dasar perbaikan strategi, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu mencegah pelanggaran sejak awal.

Selanjutnya, tindakan korektif perlu diperkuat agar mampu memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan jangka panjang. Pendekatan persuasif tetap diperlukan, namun harus diimbangi dengan penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, termasuk pencabutan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi pelanggaran berulang. Dinas Perhubungan juga perlu meningkatkan pembinaan yang lebih terarah serta melakukan pengawasan lanjutan setelah penertiban, agar pelanggaran tidak kembali terjadi. Upaya ini dapat didukung dengan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi terkait tarif resmi dan pentingnya tertib parkir. Dengan langkah tersebut, pengawasan parkir tidak hanya mampu menertibkan kondisi secara sementara, tetapi juga menciptakan ketertiban yang berkelanjutan di Kawasan Pasar Jambi.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, L. M., Mukti, K. C. W., Pranajaya, A. A. S. I. A., Firdaus, F., & Suartawan, P. E. (2023). Sipelapak Liar (Sistem Pengawasan Dan Pelaporan Parkir Liar): Perancangan aplikasi pengawasan dan pelaporan sebagai solusi penanganan parkir liar di Kota Denpasar. *Jurnal Berkala Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi (FSTPT)*, 1(3), 667-676. <https://doi.org/10.19184/berkalafstpt.v1i3.591>
- Badan Pusat Statistik Kota Jambi. (2025). *Kota Jambi dalam angka 2025* (Vol. 26). Kota Jambi: Badan Pusat Statistik Kota Jambi.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2025). Penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi (Ribu Jiwa) 2025. Retrieved from <https://jambi.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjEwOCMy/penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jambi.html>
- Detik.com. (2025). Pengelolaan parkir di Kota Jambi disorot, berpotensi praktik pungli. Retrieved from <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7893236/ombudsman-soroti-pengelolaan-parkir-di-kota-jambi-berpotensi-praktik-pungli>
- Gössling, S., Humpe, A., Hologa, R., Riach, N., & Freytag, T. (2022). Parking violations as an economic gamble for public space. *Transport Policy*, 116(December 2021), 248-257. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.12.010>
- IMCNews.id. (2025). Soroti parkir liar, Ketua DPRD Kota Jambi minta Pemkot tegas. Retrieved from <https://imcnews.id/read/2025/05/02/25112/soroti-parkir-liar-ketua-dprd-kota-jambi-minta-pemkot-tegas/>
- Iranda, A. N., Endrawati, M. C., & Nurul, A. (2025). Pengaruh aktivitas parkir terhadap tingkat pelayanan jalan di Kecamatan Klojen Kota Malang (Studi Kasus: Jalan Kawi Atas dan Jalan Kawi). *Upscales Journal*, 02(02), 94-108. <https://doi.org/10.36040/upscales.v2i2.17009>
- Kainde, J. V., Nayoan, H., & Waworundeng, W. (2021). Kinerja Dinas Perhubungan dalam menata perparkiran kendaraan bermotor di Kabupaten Mimika. *Jurnal Governance*, 1(2), 1-9.
- Mulia, R. A., Saputra, N., Syamsir, S., & Embi, M. A. (2022). Literature evaluation on optimizing supervisory functions in improving the performance of regional government bureaucracy. *Adabi: Journal of Public Administration and Business*, 9(2), 12-24. <https://doi.org/10.62066/jpab.v9i2.22>

- Nazwa, D. A., Sabila, D. N., Syafirda, I., Syifa, N. M., & Nasution, S. S. (2025). Keberadaan parkir liar terhadap kenyamanan belanja konsumen di toko ritel Kota Medan. *Jebital: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(2), 1-19. Retrieved from <https://jurnal.rumahjurnalmandalika.com/index.php/jebital/article/view/36>
- Nissan, A., Ntriankos., I., Eliasson, J., Näsman, P., & Börjesson, M. (2020). Impacts of on-street parking fees in suburbs. *International Journal of Transportation Engineering and Technology*, 6(3), 75-85. <https://doi.org/10.11648/j.ijtet.20200603.12>
- Putri, L. S., & Arif, L. (2024). Pengawasan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum di kawasan wisata Jalan Tunjungan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(11), 4762-4775. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i11.3176>
- Riyanto, A., Setiawan, I., & Darwanto. (2024). Implementasi kebijakan penanggulangan juru parkir liar terhadap ketertiban di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(05), 125-145. <https://doi.org/10.69957/praob.v4i05.1645>
- Sarinah, Said, L. O. A., & Rijah, M. (2025). Peranan fungsi pengawasan sebagai instrumen peningkatan pelayanan publik pada Inspektorat Kota Kendari. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 6(2), 38-50. <https://doi.org/10.53712/aspirasi.v6i2.2719>
- Setiono, J. (2023). Law enforcement against illegal levies as a form of abuse of authority through Saber Pungli. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(2), 41-47. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.2.5>
- Tabisi, S. A. A., Lengkong, F. D. J., & Londa, V. Y. (2023). Pengaruh pengawasan terhadap sarana publik trotoar oleh Dinas Perhubungan di Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, IX(4), 631-635.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2020). *Dasar-Dasar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winangun, I. B. P. (2022). Pelaksanaan kebijakan pengawasan dalam penertiban parkir liar di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 214-228